

karena terkait dengan harga ekspor karet (Tabel 4). Harga ekspor karet Indonesia sangat tergantung pada harga karet alam Internasional, penawaran dan permintaan. serta daya saing ekspor karet alam Indonesia dibandingkan dengan ekspor dari negara-negara pengeksport lainnya. seperti Thailand dan Malaysia.

Jenis produk ekspor karet Indonesia. pada tahun 1969 didominasi oleh sit asap (*Ribed Smoke Sheet- RSS*), tetapi sepuluh tahun kemudian didominasi oleh jenis karet spesifikasi teknis (*Standart Indonesian Rubber - SIR*). Pada tahun 2004 jenis SIR mendominasi ekspor karet alam Indonesia dengan porsi sekitar 91% dari total ekspor (Tabel 5).

Tabel 4. Pertumbuhan ekspor dan nilai ekspor karet Indonesia, 2000-2005

Tahun	Volume (000 ton)	Nilai Ekspor (USD juta)	Harga rata-rata (US \$/kg)
2000	1.379,6	888,6	0,64
2001	1.452,7	782,1	0,54
2002	1.497,3	1.038,9	0,69
2003	1.660,9	1.493,5	0,91
2004	1.874,3	2.180,0	1,16
2005	2.023,8	2.582,5	1,23
% Pertumbuhan	7,96	23,78	0,64

Tabel 5. Volume ekspor karet alam Indonesia berdasarkan tipe produk, 1969-2002

Tipe Produk	1969		1980		1990		2002	
	Volume (000 ton)	%	Volume (000 ton)	%	Volume (000 ton)	%	Volume (000 ton)	%
RSS	387,6	59	191,9	20	124	12	44,2	3
SIR	4,0	1	658,3	67	915,3	85	1.435,3	96
Crepe	78,8	12	81	8	4,2	0	0	0
Lateks	33,9	5	43,9	4	31,7	3	8,6	1
Lainnya	153,0	23	1,2	0	2,2	0	7,8	1
Total	657,3	100	976,3	100	1.077,4	100	1.495,9	100

Sumber: International Rubber Study Group (IRSG). 2003.

Dibandingkan dengan negara produsen karet alam lainnya seperti Thailand dan Malaysia, ragam produk karet yang dihasilkan dan diekspor oleh Indonesia masih terbatas jenisnya dan pada umumnya masih didominasi oleh produk primer (*raw material*) dan produk setengah jadi. Oleh karena itu nilai ekspor yang dapat diraih tentu jauh di bawah negara yang sudah menghasilkan dan mengekspor beragam produk karet olahan. Oleh karena

itu pengembangan produk (*product development*) harus difasilitasi untuk dikembangkan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Pelabuhan ekspor karet alam Indonesia yang utama adalah Belawan (Sumatera Utara) dengan ekspor sebesar 40% dari total. Palembang (Sumatera Selatan) 25%, Padang (Sumatera Barat) 10%, Pontianak (Kalimantan Barat) 8%, Jambi 6%, dan Surabaya (Jawa Timur) 5%. Sementara itu negara-negara tujuan utama ekspor karet alam Indonesia adalah Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, China, Singapura, dan Korea Selatan.

Dalam periode 1999-2004 ekspor ke Amerika Serikat menurun, karena melemahnya pertumbuhan ekonomi dan industri otomotif di negara tersebut. Sedangkan ekspor ke negara-negara Asia meningkat dengan rata-rata sebesar 2.5% per tahun, terutama ke China yang menunjukkan peningkatan sebesar 33.4% per tahun akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi, dengan rata-rata di atas 10% per tahun.

Ekspor ke negara-negara Eropa Barat meningkat sebesar 8,5% per tahun. Sedangkan ke Eropa Timur menurun sebesar 1,8% per tahun (lihat Tabel 6). Hal tersebut berkaitan dengan terjadinya pergeseran geografis konsumsi karet dunia, di mana pada tahun 1960-an konsumen utama dunia adalah negara-negara di Amerika Utara dan Eropa, sedangkan pada tahun 1980-an konsumen utama adalah negara-negara di Asia Pasifik. Pergeseran tersebut terjadi sebagai akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi dan populasi yang ada di kawasan itu, serta relokasi industri barang jadi karet yang mendekati sumber bahan bakunya.

Sebagai salah satu komoditi ekspor, harga karet alam Indonesia sangat tergantung pada harga karet alam di pasar internasional yang sangat berfluktuasi. Harga karet alam mencapai titik terendah pada bulan Nopember 2001, yaitu US\$ 579,6 per ton. Pada bulan Desember 2001 harga TSR 20 mulai meningkat secara sangat perlahan hingga pada Maret 2002 yang mencapai US\$ 793,7 per ton dan pada bulan April 2002 sedikit mengalami penurunan lagi hingga US\$ 762,1 per ton (Gambar 1). Namun setelah itu harga meningkat kembali, sehingga sejak pertengahan tahun 2002 harga karet mencapai US\$ 1,00/kg. dan pada tahun 2005 harga karet telah menyentuh tingkat US\$ 2,00/ kg untuk harga SIR 20 di SICOM Singapura.

Tabel 6. Keragaan ekspor karet Indonesia berdasarkan negara/daerah tujuan, 1999-2004

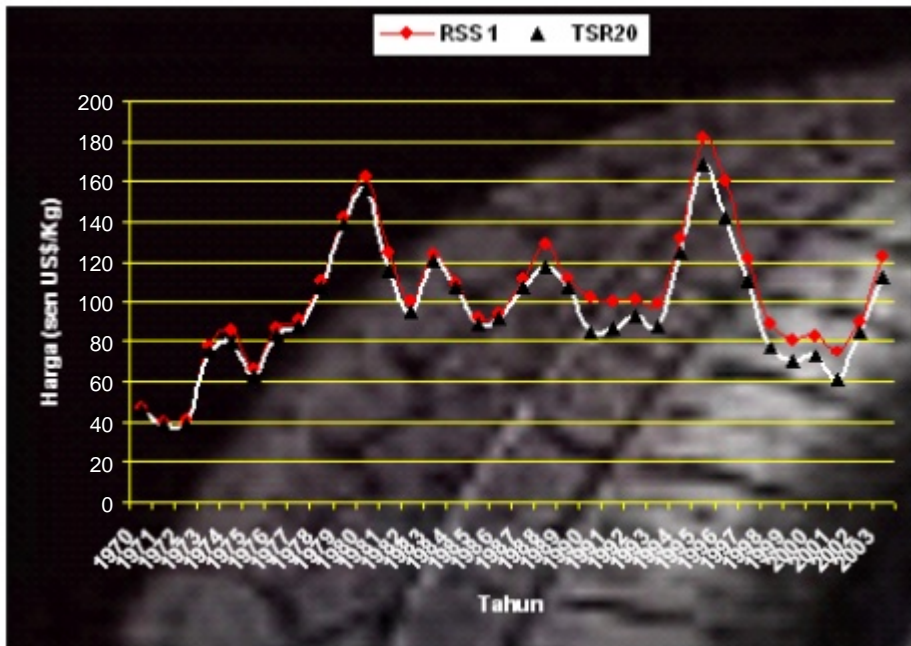
Tujuan	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Asia/Africa	395.267	388.054	488.071	466.863	65.674	686.692
Japan	126.222	144.593	151.526	207.984	228.899	225.214
Rep. Of Korea	81.693	73.295	60.045	69.608	76.893	76.794
Peop.Rep.China	27.514	35.085	136.607	46.221	107.725	197.538
Singapore	115.598	89.56	78.131	72.486	79.02	85.591
Australia	13.585	13.349	12.931	4.945	12.963	14.816
New Zealand	1.435	2.142	3.23	3.227	3.422	6.086
America	854.141	735.069	689.503	755.619	791.549	860.446
Usa	696.774	562.486	516.858	591.162	598.26	627.868
West Europe	186.034	198.108	215.641	216.833	229.157	241.444
Eastern Europe	44.088	42.576	42.475	49.721	57.937	64.495
TOTAL	1.494.555	1.379.613	1.452.689	1.497.291	1.660.920	1.874.261

Sumber: Gapkindo. 2005

Volume impor karet alam ke Indonesia relatif sangat kecil, dan terbatas dalam bentuk lateks pekat yang dibutuhkan oleh industri barang jadi lateks



dalam negeri. Sementara itu volume ekspor karet alam mencapai lebih dari 90% dari total produksi karet nasional dengan negara tujuan utama USA, China, Singapura, Jepang dan Jerman, sedangkan sisanya (7-10%) diserap oleh industri dalam negeri. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan dengan Malaysia. dimana industri hilir di dalam negeri mampu menyerap sekitar 70% dari total produksi negara tersebut. Rendahnya konsumsi karet alam domestik mencerminkan belum berkembangnya industri hilir yang berbasis karet alam. Hal ini mengakibatkan perolehan nilai tambah komoditi karet masih relatif rendah. Pada kenyataannya koordinasi vertikal dari hulu (*on farm*) ke hilir (pengolahan dan pemasaran) dalam sistem agribisnis karet di Indonesia belum optimal.



Sumber: *International Rubber Study Group (IRSG), 2003*

Gambar 1. Harga karet alam RSS (*Ribbed Smoke Sheet*) 1 dan TSR (*Technical Specified Rubber*) 20. CIF New York, Tahun 1970–2003

D. Infrastruktur, Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dalam pengembangan infrastruktur agribisnis karet diarahkan pada upaya konsolidasi dan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya infrastruktur yang ada. Pada kenyataannya, infrastruktur untuk mendukung pengembangan agribisnis karet di daerah pada umumnya masih kurang atau sangat terbatas. Infrastruktur berupa jalan dan jembatan kecuali untuk proyek PIRBUN/NES pada umumnya dibangun tidak secara langsung untuk mendorong pengembangan agribisnis karet di daerah, melainkan terkait dengan program pembangunan infrastruktur daerah.

Lembaga/organisasi petani di tingkat pedesaan sudah cukup lama dikembangkan sejalan dengan pelaksanaan proyek-proyek pengembangan karet berbantuan. Kelompok tani dan koperasi tani/perkebunan cukup banyak tumbuh dan berkembang di daerah sentra karet rakyat. Di tingkat wilayah (kabupaten dan propinsi) juga telah terbentuk Asosiasi Petani Karet Indonesia

(APKARINDO), yang berada di bawah naungan organisasi petani tingkat nasional yaitu Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO).

Kebijakan pengembangan kelembagaan karet diarahkan pada upaya pemanfaatan kawasan-kawasan pembangunan terpadu yang pernah diperkenalkan dan disosialisasikan (kapet, klaster industri, dan KIMBUN).

Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) karet yang telah dirancang didayagunakan sesuai perencanaannya dengan selalu mengkaitkan dan bersinergi dengan kepentingan sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta sektor terkait lainnya.

Untuk membantu pengembangan agribisnis karet, tersedia lembaga riset/penelitian Pusat Penelitian (Puslit) Karet yang mempunyai mandat untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan teknologi industri perkaretan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh empat balai penelitian yang berada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

III. POTENSI, PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN

A. Prospek Agribisnis Karet

1. Produksi dan Konsumsi

Prospek perkaretan dunia diperkirakan akan cerah dengan semakin kuatnya kesadaran akan lingkungan yang lebih sehat dan beberapa pabrik ban terkemuka dunia mulai memperkenalkan jenis ban *green tyres* yang kandungan karet alamnya lebih banyak (semula 30-40% menjadi 60-80%). Selain itu jumlah perusahaan industri polimer yang menggunakan bahan baku karet alam diperkirakan juga akan meningkat. Dengan semakin berkurangnya sumber-sumber ladang minyak bumi dan batu bara (*non-renewable natural resources*) sebagai bahan baku karet sintetis, persaingan antara karet alam dengan produk substitusi ini diperkirakan akan semakin berkurang.

Produksi karet alam dunia pada tahun 2005 adalah sekitar 8,8 juta ton, atau meningkat lebih dari 5% per tahun selama lima tahun terakhir (2000-2005). Sementara itu selama periode 1980-2000, pertumbuhan produksi karet alam dunia lebih dari 3% per tahun (Tabel 7). Selama lima tahun terakhir, Malaysia, Indonesia, China, Thailand, dan India mengalami pertumbuhan produksi yang relatif tinggi. Malaysia pernah mengalami pertumbuhan negatif selama periode 1980-2000, terutama karena faktor harga karet yang sangat rendah dan tumbuhnya agribisnis kelapa sawit yang dinilai jauh lebih menguntungkan. Namun dengan tingkat harga yang saat ini cukup baik, nampaknya perkebunan karet di Malaysia telah berproduksi kembali.

Tabel 7. Perkembangan produksi karet alam berdasarkan produsen utama dunia, 1980-2005

Negara Produsen	Produksi ('000 ton), tahun				Pertumbuhan/tahun (%)		
	1980	1990	2000	2005	1980-1990	1990-2000	2000-2005
Thailand	501	1.271	2.346	2.900	17,08	9,4	4,72
Indonesia	1.020	1.262	1.556	2.270	2,64	2,59	9,18
Malaysia	1.530	1.291	615	1.132	-1,74	-5,82	16,81
India	155	324	629	772	12,11	10,46	4,55
China	113	264	445	575	14,85	7,62	5,84
Lainnya	526	798	1.219	1.164	5,75	5,86	-0,90
Total	3.845	5.210	6.810	8.813	3,94	3,41	5,88

Sumber data: International Rubber Study Group (IRSG)

Sementara itu konsumsi karet alam dunia pada tahun 2005 tercatat sekitar 8,7 juta ton (Tabel 8), atau meningkat sekitar 3,8% selama lima tahun terakhir (2000-2005). Pertumbuhan konsumsi agregat karet alam dunia selama dua dekade sebelumnya (1980-2000) tumbuh lebih dari 3% per tahun. Pertumbuhan konsumsi karet alam dunia tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi karet alam China dan negara berkembang lainnya. Dengan perkembangan ekonomi yang sangat cepat, yang dicerminkan dengan laju pertumbuhan GDP yang tinggi, dan jumlah penduduk (konsumer) yang sangat besar, maka diperkirakan China akan menjadi pasar dan produsen otomotif utama di dunia, sehingga konsumsi karet alamnya juga akan terus meningkat pesat.

Dalam kelompok negara produsen karet alam, saat ini Malaysia memiliki tingkat konsumsi karet alam yang paling tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif konsisten. Sementara Amerika Serikat, Jepang, China, India, dan Korea merupakan negara konsumen karet alam utama. Melihat kecenderungan konsumsi karet alam dunia, maka negara konsumen utama telah mengalami pergeseran dari kawasan Amerika-Eropa ke kawasan Asia Pasifik.

Tabel 8. Perkembangan permintaan karet alam berdasarkan negara/regional konsumen, 1980-2005

Negara / Regional Konsumen	Konsumsi (1.000 ton). tahun				Pertumbuhan		
	1980	1990	2000	2005	1980-1990	1990-2000	2000-2005
Amerika Serikat	585	808	1.191	1.330	3,81	4,74	2,33
Eropa	1.356	1.256	1.483	1.558	-0,74	1,81	1,01
China	340	600	1.080	2.085	7,65	8,00	18,61
Jepang	427	677	752	796	5,85	1,11	1,17
Lainnya	1.062	1.839	2.834	2.976	7,32	5,41	1,00
Total	3.770	5.180	7.340	8.745	3,74	4,17	3,83

Sumber data: International Rubber Study Group (IRSG)

2. Harga

Peningkatan konsumsi karet alam di negara-negara Asia tersebut antara lain disebabkan pertumbuhan ekonomi dan populasi yang terjadi di kawasan tersebut, dan relokasi industri barang jadi karet dari negara barat ke negara produsen karet alam. Industrialisasi di negara penghasil karet alam yang terus berkembang akan mengakibatkan di satu sisi

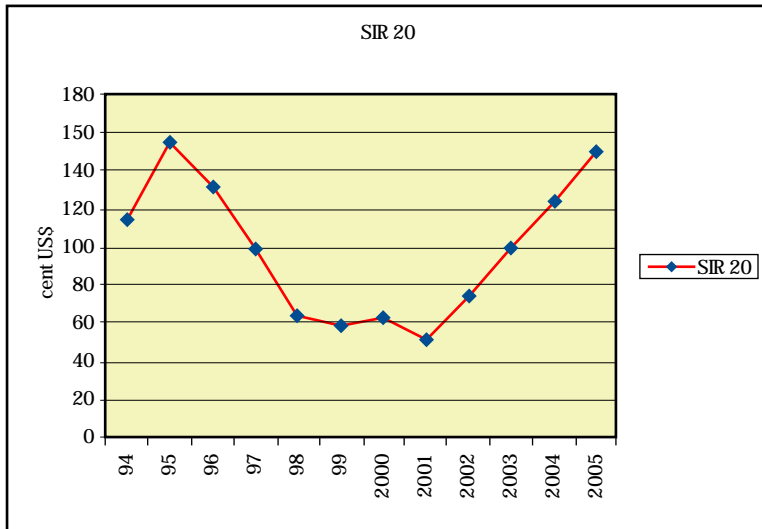
peningkatan konsumsi domestik karet alam di negara tersebut, dan di sisi yang lain penurunan produksi karet alam akibat kompetisi dengan komoditas atau industri lainnya seperti yang telah terjadi di Malaysia.

Pasok karet alam itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain harga. Harga karet alam di pasar internasional sangat berfluktuasi. Dalam satu dasa warsa terakhir, harga karet alam pernah mencapai titik terendah pada bulan November 2001, yang mencapai sekitar US\$ 46 cent per kg. Menurunnya harga karet alam dunia sejak pertengahan tahun 1997 mendorong ketiga negara produsen utama karet alam dunia yakni Thailand, Indonesia dan Malaysia untuk melakukan kerjasama tripartit dibidang produksi dan pemasaran karet alam.

Seiring dengan terbentuknya kerjasama tripartit antara tiga negara produsen karet alam dunia tersebut, harga karet alam di pasaran dunia memperlihatkan kecenderungan yang membaik. Pada akhir tahun 2001 (sebelum ditandatanganinya *Bali Declaration* 2001) harga karet alam berkisar antara US\$ 46 cents/kg–US\$ 52 cents/kg. Setelah masing-masing negara anggota melaksanakan AETS (*Agreed Export Tonnage Scheme*) dan SMS (*Supply Management Scheme*), harga merangkak naik. Pada bulan Januari 2002 mencapai US\$ 53,88 cents/kg dan pada bulan Agustus 2003 mencapai US\$ 83,06 cents/kg.

Dengan ditandatanganinya MoU oleh tiga negara pada tanggal 8 Agustus 2002, harga merangkak naik dan pada bulan September 2002 harga mencapai US\$ 89,55 cents/kg. Pada bulan Maret 2003, harga mencapai tingkat tertinggi yaitu US\$ 96,50 cents/kg (sejak krisis moneter Juli 1997), kemudian menurun lagi, dan pada bulan April 2003 harga karet turun menjadi US\$ 81,00 cents/kg, namun pada bulan Mei 2003 menjadi US\$ 82,00 cents/kg. Setelah itu harga cenderung meningkat hingga pada tahun 2005 harga karet telah menyentuh US\$ 2,00/ kg untuk SIR 20 di SICOM Singapura. Perkembangan harga karet alam (SIR 20) dari tahun 1994 sampai 2005 dapat dilihat pada Gambar 2.

Selama semester pertama tahun 2006 harga bertahan pada tingkat US\$ 2,00/kg untuk SIR 20 di SICOM Singapura. Diperkirakan harga akan stabil sekitar US\$ 1,50-2,00 pada tahun 2007. Berdasarkan proyeksi jangka panjang (2010–2020) harga karet alam diperkirakan akan dapat mencapai sekitar US\$2,5 per kg. Hal ini diharapkan akan merupakan daya tarik bagi pelaku bisnis di bidang agribisnis karet di Indonesia.



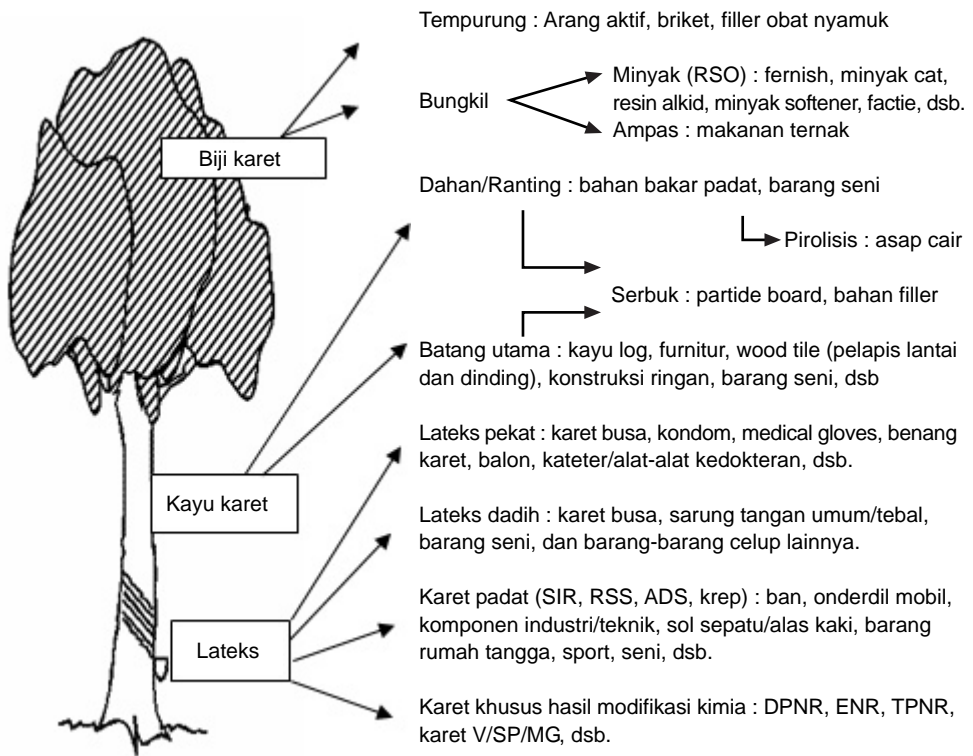
Gambar 2. Perkembangan harga karet alam, 1994-2005

3. Kayu Karet

Nilai tambah produk karet dapat diperoleh melalui pengembangan industri hilir dan pemanfaatan kayu karet sebagai bahan baku industri kayu. Gambar 3 menunjukkan pohon industri berbasis karet. Terlihat bahwa cukup banyak ragam produk yang dapat dihasilkan dari lateks, utamanya non ban, sedangkan ragam produk dari kayu karet tidak sebanyak dari lateks. Namun sampai saat ini potensi kayu karet tua belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan kayu karet merupakan peluang baru untuk meningkatkan margin keuntungan dalam agribisnis karet.

Pada saat ini kayu karet sebenarnya banyak diminati oleh konsumen baik dalam maupun luar negeri, karena warnanya yang cerah dan coraknya seperti kayu ramin. Di samping itu, kayu karet juga merupakan salah satu kayu tropis yang memenuhi persyaratan ekolabeling karena komoditi ini dibudidayakan (*renewable*) dengan kegunaan yang cukup luas, yaitu sebagai bahan baku perabotan rumah tangga, *particle board*, *parquet*, MDF (*Medium Density Fibreboard*) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agribisnis karet

pada saat ini bukan hanya berorientasi untuk produksi lateks (*polimer*) tetapi juga untuk produksi kayu.



Gambar 3. Pohon industri berbasis karet

B. Potensi Pengembangan Agribisnis Karet

1. Produksi lateks

Dari uraian di atas tergambar bahwa peluang untuk pengembangan usaha agribisnis karet cukup terbuka pada hampir semua subsistem, baik pada subsistem agribisnis hulu (*on farm*), maupun subsistem hilir. Selain itu agribisnis karet di Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative*

advantage) yang berpotensi untuk ditingkatkan menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Besarnya potensi sumberdaya yang dimiliki Indonesia, seperti sumberdaya alam (lahan dan iklim yang sesuai), teknologi, tenaga ahli, serta plasma nutfah bahan tanaman yang cukup memadai akan meningkatkan peluang tersebut. Dengan didukung oleh sistem dan manajemen produksi yang efisien dan efektif, potensi yang dimiliki tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen karet alam nomor satu di dunia.

Dalam aspek produksi, Indonesia memiliki kemampuan bersaing, terutama dalam segmen produksi bahan olah karet (bokar) dibanding dengan negara-negara produsen utama karet alam lainnya. Pada tingkat harga dibawah US\$ 0,8 per kg, Malaysia sudah tidak mampu menutupi ongkos produksinya (*taping-cost*), dan Thailand sudah pada tingkat mendekati rugi. Sedangkan Indonesia pada level harga seperti ini, masih mampu memproduksi karet alamnya. Hasil studi yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) tahun 1993 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil karet alam dengan tingkat daya saing tertinggi jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia.

Areal perkebunan karet di Indonesia tersebar terutama di sepanjang pulau Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan (93% dari luas total karet di Indonesia). Potensi peningkatan produksi karet nasional pada jangka menengah (2005-2010) terdapat pada areal karet yang ada (*existing*) saat ini (2005) seluas 3,2 juta ha melalui upaya peremajaan dan rehabilitasi tanaman. Namun pada jangka panjang (2010-2025) pengembangan areal perkebunan karet dapat dilakukan pada wilayah-wilayah non-tradisional karet terutama di kawasan Indonesia Timur yang pada umumnya merupakan daerah beriklim kering.

Daerah beriklim kering ditandai oleh curah hujan berkisar 1.000–1.500 mm/thn, dengan bulan kering berkisar 4–7 bulan. Daerah tersebut terutama tersebar di Jawa Timur, Kalimantan Timur dan sebagian besar daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan luas \pm 9 juta ha. Luas perkebunan karet di KTI saat ini adalah sekitar 17.143 ha atau hanya 0,5 % dari luas perkebunan karet di Indonesia. Ditinjau dari segi kelas kemampuan tanah berkisar IV–VI, maka lahan tersebut sesuai untuk tanaman tahunan. Dengan memanfaatkan potensi lahan tersebut, maka dampak terhadap produksi karet nasional pada jangka panjang akan sangat nyata.

2. Produksi kayu

Potensi hasil agribisnis karet yang perlu segera dieksplorasi saat ini dan ke depan adalah kayu karet, untuk mengantisipasi permintaan kayu di tingkat domestik dan dunia yang terus meningkat. Pada kenyataannya, kebutuhan kayu bulat total dunia per tahun terus meningkat. Namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi dari hutan alam yang ada sekarang karena adanya penurunan areal hutan, eksploitasi kayu hutan yang berlebihan dan tidak diikuti dengan program reboisasi yang berkesinambungan. Di tingkat nasional, diperkirakan bahwa kebutuhan kayu mencapai 58 juta m³ per tahun, sementara total produksi kayu hutan hanya sekitar 52 juta m³ /tahun.

Dengan asumsi bahwa peremajaan tanaman karet di Indonesia seluas 56 ribu ha per tahun dan tiap hektar dapat menghasilkan 50m³ kayu log untuk kayu olahan, maka potensi kayu karet adalah sebesar 2,8 juta m³/th. Potensi ini akan menjadi tiga kali lebih besar atau 8,4 juta m³/th, jika kayu karet juga dimanfaatkan untuk keperluan industri panel rakitan seperti papan partikel (*particle board*) dan papan serat (*fibre board*).

Pabrik pengolah kayu karet baru berkembang di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, dengan berbagai kendala terutama ketersediaan bahan baku yang tidak kontinyu. Ke depan, kelembagaan yang integratif dalam peremajaan tanaman karet termasuk pemanfaatan kayu karet sangat diperlukan sehingga baik petani maupun pengusaha kayu karet akan sama-sama mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil usahanya.

3. Inovasi teknologi

Sebagai salah satu komoditas pertanian, produksi karet sangat tergantung pada teknologi dan manajemen yang diterapkan dalam sistem dan proses produksinya. Produk industri perkebunan karet perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang senantiasa berubah. Status industri perkebunan Indonesia akan berubah dari pemasok bahan mentah menjadi pemasok barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah lebih tinggi yang berarti kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari produk akan meningkat. Kesemuanya ini memerlukan dukungan teknologi yang lengkap, yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan. Indonesia dalam hal ini telah memiliki lembaga penelitian karet yang mempunyai sejarah sangat panjang (sejak 1930-an) dalam menyediakan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di bidang perkaretan.

Dalam menjawab tantangan peningkatan produktivitas tanaman dan kebun, telah tersedia berbagai klon karet unggul dengan potensi produksi lateks >3 ton/ha/tahun dan kayu karet >1 m³/pohon. Selain itu juga telah tersedia paket teknologi eksploitasi, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman yang dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha perkebunan.

Di bidang pasca panen juga tersedia berbagai teknologi/inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan mengembangkan produk industri hilir karet. Dengan semakin berkembangnya teknologi otomatisasi dalam proses pembuatan barang jadi karet di negara konsumen karet alam, maka tuntutan ke arah mutu produk yang spesifik semakin besar. Saat ini kualitas ban dituntut lebih prima, sejalan dengan perkembangan teknologi otomotif dan prasarana jalan. Oleh karenanya karet alam sebagai bahan baku utama, diharapkan bermutu baik. Berkembangnya teknologi otomatisasi dan komputerisasi juga sangat menuntut pasokan bahan baku yang bermutu konsisten termasuk juga mutu karet alam.

C. Arah Pengembangan

Arah pengembangan agribisnis karet Indonesia ke depan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal sebagai berikut :

1. Permintaan karet alam dunia ke depan akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dunia, semakin mahalnya bahan baku karet sintesis, dan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan.
2. Produksi karet di Malaysia diperkirakan akan terus mengalami penurunan karena kebijakan pemerintahnya lebih berkonsentrasi pada industri hilir dan juga telah mengalihkan sebagian areal tanaman karet menjadi areal kelapa sawit.
3. Thailand diperkirakan akan menghadapi banyak kendala dalam upaya peningkatan karet alamnya karena keterbatasan ketersediaan lahan pengembangan yang berlokasi di wilayah bagian utara dengan kondisi marginal sehingga produktivitasnya lebih rendah serta keterbatasan dalam jumlah tenaga kerja.

Dengan demikian maka peluang ini paling mungkin diisi oleh Indonesia karena memiliki beberapa keunggulan yang ada seperti tersedianya tenaga kerja yang berlimpah dan murah serta tersedianya lahan dan agroklimat yang sesuai untuk pengembangan karet baru serta peningkatan produksi dan produktivitas tanaman melalui upaya peremajaan tanaman tua/rusak.

Untuk mengisi peluang tersebut Indonesia perlu menetapkan arah pengembangan komoditi karet ke depan. Pada jangka panjang (2025), agribisnis karet diarahkan menjadi usaha agribisnis yang berbasis lateks dan kayu yang berdaya saing tinggi, mensejahterakan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berdaya saing berarti bahwa agribisnis karet harus selalu berorientasi pada pasar, mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal (*capital-driven*), pemanfaatan inovasi teknologi (*innovation-driven*) dan kreativitas sumberdaya manusia (*skill-driven*). Di samping itu agribisnis karet yang dibangun harus berorientasi mensejahterakan bagi para pelaku utama usaha agribisnis tersebut dan memberikan nilai tambah yang dapat dinikmati secara nyata oleh masyarakat. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berarti bahwa dalam menjalankan agribisnis karet, pelaku selalu merespon perubahan pasar dengan cepat dan efisien, serta berorientasi pada kepentingan jangka panjang, menggunakan inovasi teknologi yang ramah lingkungan secara terus menerus, dan mengupayakan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan kegiatan pengembangan agribisnis karet ke depan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat peremajaan karet dengan menggunakan teknologi anjuran.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu hasil perkebunan karet melalui upaya rehabilitasi dan intensifikasi kebun.
3. Mengembangkan industri hilir berbasis karet alam.
4. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pekebun.

B. Sasaran

Sasaran jangka panjang (2006-2025) pengembangan agribisnis karet adalah sebagai berikut:

1. Produksi karet Indonesia akan mencapai 3,8-4 juta ton dan menjadi produsen utama karet alam dunia. Dari produksi tersebut 25% diserap oleh industri di dalam negeri dan 75% untuk ekspor.
2. Produktivitas rata-rata kebun karet akan meningkat menjadi 1.200-1.500 kg/ha. dan hasil kayu karet minimal 300 m³/ha/siklus.
3. Jenis bahan tanam yang digunakan minimal 85% klon karet unggul penghasil lateks dan kayu.
4. Pendapatan petani pekebun akan mencapai US\$ 2.000/KK. Pendapatan ini terkait juga dengan harga yang diterima petani yaitu minimal 80% dari harga FOB, petani mempunyai saham di unit pengolahan karet serta pendapatan dari diversifikasi usaha termasuk hasil kayu karet.
5. Berkembangnya industri hilir berbasis karet alam dan industri pengolahan kayu karet.

Sementara itu sasaran jangka pendek (2006-2010) adalah sebagai berikut:

1. Produksi karet Indonesia akan tumbuh dan mencapai target minimal 2,5 juta ton dari produksi tersebut 15% akan digunakan di dalam negeri dan 85% untuk ekspor.

2. Produktivitas rata-rata karet akan meningkat menjadi minimal 1.000 kg/ha, dari semula 700-800 kg/ha.
3. Jenis bahan tanam yang digunakan minimal 55% klon karet unggul penghasil lateks dan kayu.
4. Pendapatan petani pekebun akan mencapai US\$ 1.500/KK. Pendapatan ini terkait juga dengan harga yang diterima petani yaitu minimal 75% dari harga FOB dan petani mempunyai saham di unit pengolahan karet serta pendapatan dari diversifikasi usaha termasuk hasil kayu karet.
5. Berkembangnya industri hilir berbasis karet alam nasional dan industri pengolahan kayu karet di sentra-sentra penghasil karet seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.

V. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

A. Kebijakan Pengembangan Agribisnis Berbasis Karet

Untuk meraih peluang sebagai produsen karet dan produk karet terbesar di dunia, diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengembangan agribisnis karet di Indonesia ke depan. Serangkaian kebijakan umum yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan ekonomi makro (terutama di bidang moneter dan fiskal) yang kondusif bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis karet.
2. Kebijakan industri (*industrial policy*) yang memberi prioritas pada pengembangan klaster industri (*industrial cluster*).
3. Kebijakan perdagangan internasional (*international trade policy*) yang netral namun antisipatif baik secara sektoral, domestik, maupun antar negara dalam kerangka mewujudkan suatu perdagangan yang lebih bebas dan lebih adil (*freer and fairer trade*) dan dinamis dalam merespon perkembangan pasar.
4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik, telepon, pengairan) di daerah-daerah yang kondusif bagi keberlangsungan usaha agribisnis yang efisien dan efektif.
5. Kebijakan pengembangan kelembagaan (*institutional policy*) baik lembaga keuangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan sumberdaya manusia, dan penyuluhan, serta pengembangan kelembagaan dan organisasi petani.
6. Kebijakan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan secara efisien dan bijaksana.
7. Kebijakan pengembangan pertumbuhan agribisnis karet di daerah.
8. Kebijakan ketahanan pangan dikaitkan dengan sistem dan usaha agribisnis karet.

Kebijakan ekonomi makro, terutama di bidang moneter dan fiskal hendaknya kondusif bagi terwujudnya pembangunan sistem dan usaha agribisnis karet. Jajaran pemerintah, mulai dari pusat, propinsi dan kabupaten seyogyanya mempunyai kebijakan yang terintegrasi, harmonis dan sinergis dalam bidang moneter.

Dalam bidang moneter diupayakan agar tersedia dana dari sumber-sumber perbankan atau non perbankan yang dapat memberikan rangsangan dan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis karet yang kompetitif pada semua sub-sistem usaha agribisnis tersebut, terutama pada subsistem “*on farm*”. Untuk itu diperlukan inovasi dan kreasi di tingkat nasional maupun lokal dalam mengupayakan tersedianya dana bagi pengembangan usaha agribisnis karet. Dukungan pendanaan dari perbankan diharapkan akan kembali pulih sebagaimana sediakala, karena usaha agribisnis karet masih cukup prospektif dan tingkat profitabilitasnya cukup memadai, serta sifat dari arus tunainya (*cash flow*) berkelanjutan.

Di bidang fiskal, pemerintah di semua tingkatan hendaknya memiliki kebijakan yang kondusif bagi pengembangan usaha agribisnis karet, yaitu pembebanan pajak dan pungutan lainnya yang rasional, baik menyangkut besaran yang dibebankan, maupun prosedur penerapannya. Pemerintah daerah seyogyanya memikirkan dampak jangka panjang dalam penetapan retribusi ataupun pungutan-pungutan lainnya dalam usaha agribisnis karet.

Arah kebijakan industri (*industrial policy*) memberikan prioritas pada pengembangan klaster industri (*industrial cluster*), yaitu kebijakan yang didasari atas kepentingan jauh ke depan, berorientasi pada nilai tambah domestik dengan proses produksi yang efisien dan efektif dan terintegrasi dalam semua tingkatan/subsistem mulai subsistem hulu (*on farm*), pengolahan, pemasaran dan jasa pendukung lainnya. Sebagai langkah awal, Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) karet dapat diadopsi dan didayagunakan sesuai dengan perencanaannya dan selalu mengkaitkan dan bersinergi dengan kepentingan sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta sektor terkait lainnya.

Arah kebijakan pada sub-sistem hulu adalah terwujudnya suatu kondisi dimana ketersediaan sarana produksi (bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan) dapat tercukupi dari produksi dalam negeri dengan tingkat mutu dan harga bersaing dengan produk-produk sejenis yang diimpor.

Kebijakan pada sub-sistem agribisnis “*on farm*” diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil lateks dan kayu, mutu hasil panen, melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif serta mengindahkan kelestarian lingkungan (*good farming practices*). Upaya regenerasi tanaman/peremajaan (*replanting*) sudah harus dimulai seiring dengan habisnya masa produktif tanaman karet. Dalam jangka panjang, keterkaitan sub-sistem “*on farm*” dengan subsistem pengolahan dan

pemasaran dalam usaha agribisnis karet perlu mendapat perhatian yang proporsional, dan upaya ini akan direalisasikan dalam bentuk pengembangan usaha patungan yang bercirikan perusahaan kemasyarakatan (*corporate community*) melalui replikasi model-model pengembangan yang sudah ada atau membangun model baru yang sesuai.

Kebijakan pada sub-sistem pengolahan dan industri hilir diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan tumbuh dan berkembangnya pengolahan dan industri hilir karet yang menghasilkan jenis produk sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen yang berkembang dinamis, serta dapat memberikan nilai tambah optimal di dalam negeri. Produk karet terutama *crumb rubber*, dengan total ekspor pada tahun 2005 melebihi 1,6 juta ton, dan menguasai pangsa ekspor karet sekitar 83%, perlu dimantapkan dan terus ditingkatkan pangsaanya, baik pada pasar yang sudah ada maupun melalui pengembangan pasar baru. Oleh karena itu, arah kebijakan perdagangan internasional harus bersifat responsif dan antisipatif, sehingga persoalan-persolan yang diperkirakan akan muncul dalam perdagangan internasional/global dapat segera ditangani lebih awal. Untuk itu, seluruh potensi sumberdaya pemasaran yang ada, baik di dalam maupun di luar negeri perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan dalam pengembangan infrastruktur agribisnis karet diupayakan pada upaya konsolidasi dan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya infrastruktur yang ada (*software* maupun *hardware*), antara lain kawasan-kawasan pembangunan terpadu yang pernah diperkenalkan dan disosialisasikan (KAPET, Klaster Industri, dan KIMBUN) perlu dimanfaatkan.

B. Strategi

Untuk mencapai kondisi agribisnis karet yang berdaya saing tinggi dan posisi Indonesia sebagai negara penghasil karet dan produk karet terbesar di dunia tersebut diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. *On-farm*

Upaya yang ditempuh adalah meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan karet melalui:

- a. Peningkatan penggunaan klon unggul penghasil lateks dan kayu yang mempunyai produktivitas lateks potensial lebih dari 3.000 kg/ha/th, dan menghasilkan produktivitas kayu karet lebih dari 300m³/ha/siklus.
- b. Percepatan peremajaan karet tua dan tidak produktif terutama pada perkebunan karet rakyat direalisasikan melalui gerakan peremajaan tanaman karet rakyat seluas 250 ribu ha sampai dengan tahun 2010, dan minimal 1 juta ha sampai dengan 2025.
- c. Perluasan areal karet seluas minimal 50 ribu ha yang dicapai melalui program pembangunan karet berbantuan (pemerintah). Perluasan areal dilakukan pada wilayah yang secara agroklimat sesuai untuk karet, di samping mempertimbangkan luasan usaha secara ekonomis.
- d. Diversifikasi usahatani karet melalui integrasi dengan tanaman pangan dan ternak untuk peningkatan pendapatan keluarga tani.
- e. Peningkatan efisiensi usaha pada setiap tahap proses produksi untuk menjamin margin keuntungan dan daya saing yang tinggi.

2. *Off-farm*

Di bidang *off-farm* upaya yang ditempuh untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan pendapatan petani adalah melalui :

- a. Peningkatan kualitas bahan olah karet (bokar) yang dihasilkan petani sesuai dengan SNI bokar yang disyaratkan oleh industri pengolahan.
- b. Peningkatan efisiensi pemasaran bokar dan bagian harga yang diterima petani melalui upaya penguatan kelembagaan petani dan efisiensi tata niaga bokar.
- c. Penyediaan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkait dengan peremajaan karet dan pengembangan usaha bersama dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran.
- d. Pengembangan infrastruktur yang menunjang pengembangan produksi dan pengolahan barang jadi karet.
- e. Peningkatan nilai tambah produk melalui pengembangan industri hilir yang ramah lingkungan, dan pengembangan industri pengolahan kayu karet (*furniture industry*) yang dikaitkan dengan program peremajaan.

- f. Peningkatan pendapatan petani melalui berbagai upaya peningkatan hasil usahatani (perbaikan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran), dan penciptaan usaha industri kecil dan menengah pedesaan.

C. Program

Untuk mencapai sasaran jangka pendek (2006-2010) yaitu peningkatan produksi karet minimal 2,5 juta ton/th dengan tingkat produktivitas rata-rata kebun minimal 1.000 kg/ha, diperlukan upaya peremajaan dan intensifikasi pemeliharaan tanaman. Dengan demikian program peremajaan menjadi prioritas kegiatan pembangunan agribisnis karet pada jangka pendek.

1. Model peremajaan

Model peremajaan karet rakyat yang diterapkan adalah Model Peremajaan Partisipatif. Menurut Pusat Penelitian Karet/Balai Penelitian Sembawa, landasan utama pendekatan partisipatif dalam program peremajaan karet rakyat adalah adanya kebutuhan untuk mengubah paradigma pembangunan karet rakyat yang semula menggunakan pendekatan “proyek berbantuan” menjadi “gerakan swadaya masyarakat” (*self-help community development*) atau “pendekatan dari bawah” (*bottom-up approach*).

Prinsip dasar pendekatan *self-help development* adalah mendorong masyarakat untuk belajar mengatasi masalah mereka sendiri dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan.

Dengan demikian, landasan Model Peremajaan Karet Rakyat adalah Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penerapan model ini adalah :

- a. Pendekatan Wilayah meliputi: perbedaan akses informasi, kesiapan kelembagaan dan ketersediaan sarana pendukung.
- b. Pendekatan Individu meliputi: perbedaan pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan kemampuan finansial.

Pendekatan ini sangat tergantung pada karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi petani. Model peremajaan karet partisipatif ini telah diterapkan pada peremajaan karet rakyat di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan peremajaan karet dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat di wilayah pengembangan, antara lain petani karet/koperasi petani, GAPKINDO, Dinas Perkebunan, Balai Penelitian, perusahaan kayu karet, Pemerintah Daerah, dan lembaga keuangan/perbankan.

2. Sasaran peremajaan

Peremajaan tanaman karet rakyat dilaksanakan pada kebun karet rakyat yang kondisinya memang sudah tidak produktif atau tanamannya tua/rusak. Lingkup pelaksanaan peremajaan karet meliputi karet rakyat baik karet rakyat swadaya maupun karet rakyat eks proyek PIR dan UPP. Dalam pelaksanaan peremajaan karet ini, petani atau kelompok tani pemilik kebun dilibatkan langsung dalam kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar petani/masyarakat dapat lebih termotivasi, dan meningkatkan pengetahuan serta kemajuan dalam penguasaan sumberdaya dan berusahatani, sekaligus mengikutsertakan petani dalam mengelola usahatani.

Dalam pelaksanaan peremajaan dilakukan penanaman tanaman sela (*intercropping*) dan sekaligus memanfaatkan kayu karet hasil tebangan. Untuk itu perlu adanya keterpaduan dengan industri pengolahan kayu karet. Hasil penjualan kayu karet tersebut digunakan untuk membiayai sebagian dana peremajaan. Pada kondisi dimana pabrik pengolah kayu karet tersedia dan akses transportasi relatif baik, maka hasil penjualan kayu karet dapat bervariasi antara Rp 5-7,5 juta/ha. Jumlah ini dapat menutupi kebutuhan utama pada tahun awal peremajaan karet.

Sesuai dengan kondisi tanaman karet rakyat dan kemampuan untuk melakukan peremajaan, maka direncanakan akan dilakukan peremajaan karet rakyat seluas 250 ribu ha dan perluasan areal karet sekitar 50 ribu ha sampai dengan 2010 yang dicapai melalui program peremajaan berbantuan (pemerintah) dan swadaya masyarakat.

3. Organisasi pelaksanaan

Rancangan peremajaan karet rakyat secara partisipatif melibatkan banyak pihak, yaitu petani/koperasi, investor, instansi terkait, lembaga penelitian, perbankan dan Pemda. Agar pelaksanaan peremajaan karet tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, maka untuk pelaksanaan di daerah perlu dibentuk unit pengelola program peremajaan

(*program management unit/PMU*) yang beranggotakan semua pihak (*stakeholders*) terkait.

Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, maka pihak-pihak yang terlibat serta tugas dan kewajiban masing-masing pihak dapat ditetapkan sebagaimana disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Instansi dan peranannya dalam kegiatan peremajaan

Instansi	Fungsi/Peran
Ditjen BP. Perkebunan	Menyiapkan Pedoman dan rencana peremajaan. Memfasilitasi pembiayaan peremajaan
Pusat Penelitian Karet/Balai Penelitian Karet	Menyiapkan Pedoman Teknis Peremajaan Karet yang mencakup bibit, penebangan kayu, penanaman/ peremajaan dan pemeliharaan. Menyiapkan bibit karet klon unggul (melalui waralaba benih).
Pemda Propinsi/Kabupaten	Menyiapkan Petunjuk Teknis, Pembinaan teknis. Koordinator Pelaksanaan, Fasilitasi Pembiayaan.
PTPN (PIR Karet)	Penyediaan saprodi (bahan tanaman, dan lain-lain), Pembinaan, <i>Avalis</i> dalam pendanaan.
GAPKINDO	Memberikan bantuan dana baik untuk bahan tanam maupun sarana produksi, Memfasilitasi pemasaran.
Perbankan / Bank Pembangunan Daerah / Lembaga Pembiayaan	Penyediaan dana.
Petani/Kelompok Tani/Koperasi/Asosiasi Petani Karet/CCDC Karet	Mengelola dana hasil penjualan kayu untuk kegiatan peremajaan, Koordinator kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana produksi.
Perusahaan Kayu Karet	Penebangan kayu karet, Pembelian kayu karet.
Perusahaan Pupuk	Penyediaan pupuk.
Kelompok Tani	Mengelola kepentingan kelompok dalam hubungannya dengan pihak di luar kelompok

4. Pembiayaan

Untuk peremajaan karet rakyat per ha diperlukan dana sekitar Rp 15.600.000,- yang diperlukan untuk membiayai peremajaan dan penanaman tanaman sela perkebunan. Sementara kebutuhan biaya untuk perluasan kebun mencapai Rp. 16.950.000 per ha. Perkiraan kebutuhan biaya peremajaan dan perluasan kebun per ha disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perkiraan biaya peremajaan karet per hektar

Jenis Pengeluaran	Biaya tahun ke - (Rp.000)						Total (Rp.000)
	0	1	2	3	4	5	
Peremajaan kebun (ha)	6.895	2.226	1.521	1.796	1.324	1.838	15.600
Biaya (Rp miliar)	8.243	2.226	1.521	1.796	1.324	1.840	16.950

Sumber pendanaan untuk peremajaan karet rakyat dapat berasal dari :

- Dana pemerintah baik APBN maupun APBD. Khusus untuk dana APBD dapat digunakan untuk subsidi bunga kredit bagi petani,
- Kredit perbankan,
- Hasil penjualan kayu karet,
- GAPKINDO, dan
- Swadaya petani.

Pengelolaan dana untuk peremajaan khususnya yang bersumber dari kredit perbankan dan hasil penjualan kayu karet disarankan dapat dilakukan oleh kelompok tani/koperasi. Besarnya dana hasil penjualan kayu karet yang digunakan untuk tambahan biaya peremajaan tergantung pada kesepakatan petani/kelompok tani dengan perusahaan kayu karet. Besarnya kredit yang menjadi beban petani harus didiskusikan dengan petani secara terbuka, karena kredit ini akan menjadi beban/tanggung jawab petani.

VI. KEBUTUHAN INVESTASI

Biaya yang diperlukan untuk mengembangkan komoditi karet ke depan mencakup kebutuhan biaya peremajaan karet non-produktif dan perluasan. Untuk biaya pembangunan kebun peremajaan diperlukan biaya minimal Rp. 15,6 juta/ha, sedangkan perluasan sebesar Rp. 16,95 juta/ha. Biaya tersebut diperlukan untuk pembongkaran tunggul, pengadaan bibit, penanaman, pupuk dan pestisida, tanaman sela, dan pemeliharaan tanaman. Kebutuhan biaya dalam kurun waktu 2006-2010 untuk peremajaan adalah sekitar Rp. 3,6 triliun dan perluasan sekitar Rp 847,5 miliar (Tabel 11).

Tabel 11. Kebutuhan biaya untuk peremajaan karet, 2006–2010

Kegiatan	2006 – 2010
Peremajaan kebun :	
Luas (ha)	250.000
Biaya (Rp miliar)	3.900
Perluasan kebun :	
Luas (ha)	50.000
Biaya (Rp miliar)	847.5

Pada dasarnya pembiayaan yang diperlukan untuk merealisasikan rencana pengembangan karet ke depan dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu dana masyarakat dan perbankan, pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, dan dana komoditi. Dengan pertimbangan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pengembangan karet ke depan sangat besar, sementara dana pemerintah dan perbankan sangat terbatas. maka perlu segera ditinjau untuk menghidupkan kembali pungutan dana dari komoditi (semacam Cess) karet untuk pengembangan, promosi, peremajaan dan peningkatan kapasitas SDM pada komoditi karet.

Hasil monitoring jumlah pabrik pengolahan karet remah di Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan bahwa saat ini jumlah kapasitas terpasang pabrik telah mencapai 3.063.137 ton. sedangkan ketersediaan bahan olah mencapai 2.201.641 ton. Ini berarti terjadi kelebihan kapasitas pabrik pengolahan karet.

Perimbangan antara kapasitas terpasang dengan produksi di berbagai Propinsi cukup beragam. Beberapa propinsi utama penghasil karet seperti Sumsel, Jambi dan Sumut pada umumnya telah terjadi kelebihan kapasitas pabrik. Hasil simulasi preiksi pertumbuhan produksi (5%) sampai dengan tahun 2010 menunjukkan bahwa masih terjadi defisit bahan olah karet sehingga belum perlu menambah investasi baru di pabrik karet remah. Pada saat ini, kebutuhan dana untuk investasi pabrik karet remah dengan kapasitas 18 ribu ton/tahun adalah sekitar Rp 25 miliar, sedangkan untuk pabrik lateks pekat dengan kapasitas 1.350 ton/th adalah sekitar Rp 4 miliar, dan pabrik RSS dengan kapasitas 990 ton/th adalah sekitar Rp 5 miliar.

Pemanfaatan kayu karet di dalam negeri masih mengalami kendala dalam beberapa hal seperti tidak jelasnya kelembagaan yang menangani kayu karet, kurangnya kontinuitas sumber bahan baku karena lokasi bahan baku yang terpencar dengan aksesibilitas yang terbatas terhadap fasilitas angkutan, kualitas kayu yang sangat beragam dan pengiriman produk yang tidak kontinyu, ketimpangan harga bahan baku di tingkat pabrik (tinggi) dan produk (rendah), jenis produk yang kurang variatif, adanya pajak ekspor permanen (USD 150/m³), serta kurangnya apresiasi pasar domestik terhadap kayu karet. Masuknya investasi pada pabrik pengolahan kayu karet tentu saja akan sangat tergantung pada seberapa jauh hambatan-hambatan di atas dapat dikurangi. Pada saat ini investasi peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan *treated sawn timber* adalah sekitar Rp 2,12 miliar dengan kapasitas 20 m³/hari.

VII. DUKUNGAN KEBIJAKAN

Untuk mempercepat laju investasi di bidang agribisnis karet, diperlukan beberapa kebijakan pendukung sebagai berikut :

1. Penciptaan iklim investasi yang makin kondusif :
 - a. Pemberian kemudahan dalam proses perijinan.
 - b. Pembebasan pajak (*tax holiday*) selama tanaman atau pabrik belum berproduksi.
 - c. Pemberian rangsangan kepada pengusaha untuk menghasilkan *end product* bernilai tambah tinggi yang non-ban, yang prospek pasarnya di dalam negeri cerah.
 - d. Adanya kepastian hukum dan keamanan baik untuk usaha maupun lahan bagi perkebunan.
 - e. Penghapusan berbagai pungutan dan beban yang memberatkan iklim usaha.
2. Pengembangan sarana dan prasarana berupa jalan, jembatan, pelabuhan, alat transportasi, komunikasi, dan sumber energi (tenaga listrik).
3. Penyediaan dana dengan menghidupkan kembali pungutan dari hasil produksi/ekspor karet (semacam Cess) yang sangat diperlukan untuk membiayai pengembangan industri hilir, peremajaan, promosi dan peningkatan kapasitas SDM karet. Kelembagaan Cess tidak seperti dulu lagi tetapi mengambil bentuk sebagai institusi yang bersifat *independent* di bawah Departemen Keuangan dengan aturan main yang jelas dan sedemikian rupa sehingga penggunaan dana mudah diawasi dan kembali untuk kepentingan investasi di bidang perkebunan.
4. Pengembangan sistem kemitraan antara petani dan perusahaan, misalnya dengan pola "PIR Plus". Dalam pola ini dapat didesain petani tetap memiliki kebun beserta pohon karetnya, dan ikut sebagai pemegang saham perusahaan yang menjadi mitranya. Dengan cara demikian, maka kepastian bagi perusahaan untuk memperoleh bahan baku dalam jumlah cukup lebih terjamin.